

## Sosialisasi Hukum Terkait Politik dan Pemuda

Aryo Akbar<sup>1</sup>, \* Radian Suparba<sup>2</sup>, Setyo Utomo<sup>3</sup>, Rusdi Bromi<sup>4</sup>, Almaidah<sup>5</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

<sup>3</sup>Program Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

<sup>4,5</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

\*Corresponding Author : [radiansuparba2023@law.uir.ac.id](mailto:radiansuparba2023@law.uir.ac.id)

### Abstrak

Ditengah kondisi perpolitikan yang tidak stabil saat ini menyebabkan kegoncangan dibidang otonomi daerah provinsi Riau, hukum dan ekonomi yang tercermin dari keadian provinsi Riau yang mengalami deficit anggaran sebesar Rp.1,5 trilyun dan penundaan pembayaran kegiatan sebesar Rp. 2,2 triliun, lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di peringkat pertama paling korupsi di ASEAN berdasarkan hasil survei IndexMundi pada tahun 2024, turunnya tingkat demokrasi Indonesia berdasarkan The Economist Intelligence Unit (EIU) sehingga menempati peringkat ke-59 dari total 167 dan dikategorikan sebagai demokrasi cacat (flawed democracy), serta Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara waktu atau trading halt akibat IHSG ambruk hingga 6,12 persen ke posisi 6.076,08 pada tanggal 18 Maret 2025 lalu. Tentunya permasalahan yang bertubi-tubi ini tidak sangatlah sulit diatasi hanya dalam jangka waktu satu periode, sehingga diperlukannya darah baru untuk menjalankan perpolitikan Indonesia. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah, aparat dan pendidik saat ini karena tidak sedikit pemuda menyadari fungsi politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, dalam kesempatan ini, tim pengabdian melaksanakan sosialisasi memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, berharap memberikan masukan segar untuk menghadapi fenomena politik saat.

**Kata Kunci:** Politik, Pemuda, Pemilu

### Abstract

*In the midst of the current unstable political conditions causing turmoil in the regional autonomy of Riau province, law and economy as reflected in the Riau province which experienced a budget deficit of IDR 1.5 trillion and delayed payment of activities of IDR 2.2 trillion, the Indonesian National Police (Polri) is ranked first as the most corrupt in ASEAN based on the results of the IndexMundi survey in 2024, the decline in Indonesia's democracy level based on The Economist Intelligence Unit (EIU) so that it is ranked 59th out of a total of 167 and is categorized as a flawed democracy, and the Indonesia Stock Exchange (IDX) temporarily halted trading due to the IHSG collapsing by 6.12 percent to 6,076.08 on March 18, 2025. Of course, these repeated problems are not very difficult to overcome in just one period, so new blood is needed to run Indonesian politics. This is a tough task for the government, apparatus and educators today because not a few young people realize the function of politics for the life of the nation and state. So, on this occasion, the service team carried out socialization to provide political education for the younger generation, hoping to provide fresh input to face the current political phenomenon.*

**Keywords:** Politics, Youth, Election



## PENDAHULUAN

Fakta yang perlu diketahui bahwa total pemilih sebanyak 2juta lebih yang memilih dan memiliki hak suara pemilu 2024, didalamnya terdapat 60 % generasi muda yang diwakili oleh generasi Z, generasi milenial, dan generasi X,(Ahmad Faishal Adnan, 2024) dimana generasi ini sangat mudah berpengaruh media sosial berupa twittwe (X). Facebook, tiktok dan youtube. Baik langsung maupun tidak langsung kemampuan seseorang untuk mempengaruhi individu lain atau kelompok lain yang merupakan inti dari politik. Hal tersebut, dinamai 'politik digital' yaitu usaha penggunaan teknologi digital bertujuan melibatkan masyarakat untuk partisipasi politik , khususnya generasi muda yang biasa disebut "Gen-Z".(Laila Nadliya, 2023) Aktivisme digital memungkinkan masyarakat untuk berpolitik kapanpun, dimanapun, dan tidak terbatas ruang dan waktu, ini merupakan salah satu bentuk perubahan komunikasi politik masyarakat.(Nafiza Suci Azzahri, 2024)

Ditengah kondisi perpolitikan yang tidak stabil saat ini menyebabkan kegoncangan dibidang otonomi daerah provinsi Riau, hukum dan ekonomi yang tercermin dari keadian provinsi Riau yang mengalami deficit anggaran sebesar Rp.1,5 triliun dan penundaan pembayaran kegiatan sebesar Rp. 2,2 triliun(David Oliver Purba, 2025), lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berada di peringkat pertama paling korupsi di ASEAN berdasarkan hasil survei IndexMundi pada tahun 2024(Hasiholan, 2024), turunya tingkat demokrasi Indonesia berdasarkan *The Economist Intelligence Unit* (EIU) sehingga menempati peringkat ke-59 dari total 167 dan dikategorikan sebagai demokrasi cacat (*flawed democracy*)(Vedro Imanuel Girsang, 2025), serta Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan perdagangan sementara waktu atau trading halt akibat IHSG ambruk hingga 6,12 persen ke posisi 6.076,08 pada tanggal 18 Maret 2025 lalu.(Vedro Imanuel Girsang, 2025)

Undang-Undang Dasar merupakan konstitusi yang mencerminkan perjanjian antara nagara dan rakyat. Empat kali perubahan UUD 1945 merupakan akibat dari trauma orde baru dan krisis ekonomi sehingga telah diputuskan demi tidak terulangnya lagi kejadian yang serupa perubahan dimulai dari pelaksanaan konstitusi. UUD 1945 Amandemen ke-empat, masih mempertahankan hak politik warga negara sebagaimana pada pasal 27 ayat (1) yang menyatakan menyatakan persamaan kedudukan semua warga negara terhadap hukum dan pemerintahan. pasal ini saja tidaklah cukup untuk mejamin hak politik warga negara, kemudian ditambah dengan pasal 28 yang diubah dan ditambah pasalnya sehingga hak politik warga negara terjamin dalam Pasal 28D ayat (3) yang menyatakan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.(Salim & Suyadi, 2020) Hak politik secara teoritis adalah hak yang melekat oleh setiap warga negara berdasarkan hukum bertujuan untuk meraih kekuasaan, kedudukan dan/atau kekayaan sehingga dapat memberu manfaat bagi warga negara.(Siagian, 2022)

Berdasarkan Delier Noer, ilmu politik berpusat pada masalah kekuasaan baik dalam masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari. Maka, untuk mewujudkan ideology, kekuasaan diperlukan dalam mempengaruhi hukum, sosial dan ekonomi. Hak



politik warga negara berdasarkan UUD 1945 amandemen ke-empat antara lain Hak untuk memilih dan dipilih; Hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan; Hak untuk mengemukakan pendapat; Hak untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan, Hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya; Hak untuk berkumpul, berserikat, Hak untuk menyampaikan pandangan atau pemikiran tentang politik.(Bawamenewi, 2019)

Bercermin pada peristiwa dibalik UUD 1945 Amendem ke-empat, permasalahan yang bertubi-tubi ini tidak bisa diatasi dalam jangka waktu satu periode saja, sehingga diperlukannya darah baru untuk menjalankan perpolitikan Indonesia. Ini merupakan tugas berat bagi pemerintah, aparat dan pendidik saat ini karena tidak sedikit pemuda menyadari fungsi politik bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka, dalam kesempatan ini, tim pengabdian melaksanakan sosialisasi memberikan pendidikan politik bagi generasi muda, berharap memberikan masukan segar untuk menghadapi fenomena politik saat ini.

### **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan penyuluhan hukum tentang pendidikan ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan tanya jawab. Tim pengabdian masyarakat mempersiapkan narasumber dan bahan yang berkaitan dengan politik dan hukum dengan tujuan memberikan brainstorming pada generasi muda. Penyuluhan hukum ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2025. Tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum ini adalah di kediaman Hj. Arwinda Gusmalina, S.T. Selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Acara ini dihadiri oleh beberapa Pemudia yang berstatus menempuh pendidikan baik di dalam maupun diluar Provinsi Riau serta Pemuda yang telah bekerja.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan pendidikan politik yang bersifat praktis bagi generasi muda agar mudah dipahami oleh generasi muda yang saat ini disebut dengan generasi Z di JL. Ramah Kasih, kec. Tenayan raya, Pekanbaru , hasilnya kegiatan ini berjalan dengan lancar. berkat bantuan dari Hj. Arwinda Gusmalina, S.T. Selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang telah menyediakan lokasi penyuluhan yang strategis dan mengundang masyarakat khususnya generasi muda. Pemuda yang hadir didalam acara penyuluhan ini memperhatikan penyampaian narasumber dan aktif bertanya berkenaan dengan Judul penyuluhan yaitu “Politik dan Pemuda” yang disampaikan oleh narasumber. Berdasarkan hal tersebut, Tim pengabdian merangkum, menganalisis, menulis serta mempresentasikan hasil penyuluhan dalam uraian.

Tim penyuluh yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau memberikan arahan kepada masyarakat untuk memahami sifat-sifat dari politik dan fungsinya bagi pemerintah daerah dan Negara. Menelaah masalah yang dihadapi masyarakat terkait dengan pemilu, pajak dan kinerja Pemerintah mewujudkan kesejahteraan melalui pemahaman dibidang politik, ekonomi dan hukum. Maka Pendidikan politik bagi generasi muda sangatlah penting guna memahami pentingnya pemilu yang berlandaskan hak dipilih dan memilih, pentingnya politik dalam mempengaruhi kebijakan public, dan membentuk karakter berdasarkan semangat gotong royong. (Wanma, 2015)

Saat ini generasi yang masih ada yaitu Generasi X (1965-1980), Milenial (1981-1996), Generasi Z (1997-2012), Generasi Alpha (2013-2024) dan Generasi Beta



(2025-2039). Untuk berpartisipasi langsung dalam politik, standar yang ditetapkan sebagai syarat sebagai berikut:

1. Syarat berpartisipasi dalam pemilu untuk menggunakan hak memilih adalah memiliki KTP atau berumur 17 tahun.
2. Syarat menjadi anggota Partai Politik disesuaikan dengan AD/ART Parpol yaitu minimal 17 tahun atau sudah pernah menikah.
3. Syarat menjadi calon anggota DPR atau DPRD berlandaskan UU Pemilu yaitu minimal 21 tahun.
4. syarat menjadi calon kepala daerah berdasarkan UU Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yaitu 30 tahun untuk menjadi calon gubernur dan 25 tahun untuk menjadi calon walikota dan bupati.

Salah satu hasil politik yang memiliki manfaat jangka panjang adalah Internet yang mulai dipopulerkan pada tahun 1998 melalui Organisasi ISP Indonesia. (Tim DetikEdu, 2023) Gen-Z sangat memiliki ketergantungan pada internet untuk berkomunikasi, namun perlu diketahui bahwa diizinkannya internet masuk Indonesia karena secara politis pada legislative dan executive menyetujui memfasilitasi internet kepada masyarakat, sebagai bentuk dari kebijakan publik. Narasumber memberikan mengandaia bahwa internet bisa dimatikan, jika manfaatnya sudah tidak lagi menguntungkan kegiatan politik, maka untuk mempertahankannya generasi penerus perlu memberikan pemahaman dan penjelasan manfaat internet bagi masyarakat.

Politik adalah alat untuk mempengaruhi seseorang, akan tetapi pemilu bukanlah satu-satunya cara berpolitik. Mempengaruhi suatu individu dan kelompok dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan seperti demonstrasi, berorasi di depan public, memberikan penyuluhan atau memberikan informasi textual di media massa atau buku yang mana semua itu bertujuan untuk merubah atau mempertahankan keadaan dengan mempengaruhi masyarakat. Hasil dari politik tersebut akan membentuk pergerakan yang diharapkan dan direalisasikan oleh masyarakat dan pemerintah sebagai prioritas, dan tercatat sebagai rumusan untuk dilaksanakan prosesnya baik secara sukarela maupun paksaan. (Miriam Budiardjo, 2019)

Pada sesi tanya jawab masyarakat secara bergantian bertanya kepada Narasumber berkenaan dengan permasalahan politik dan pemuda, inti dari diskusi antara pemuda dan narasumber membahas fungsi politik sebagai pemecahan masalah. Saat ini dikhawatirkan krisis moneter akan kembali berhadapan dengan Indonesia, pengaruhnya sampai pada pemuda baik yang sedang menempuh pendidikan maupun sudah bekerja, untuk memecahkan masalah melalui politik yang utama adalah berdialog dengan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama politisi, kekuasaan politisi terutama yang masuk parlemen bukan hanya bertugas mengelola dana APBD, namun juga dapat menyampaikan permasalahan baik didalam maupun diluar parlemen untuk mencari alternative solusi, disaat solusi hukum atau sosial mengalami kebuntuan.

Berdasarkan hasil tanya jawab antara masyarakat dengan tim pengabdian menyimpulkan bahwa politik merupakan alat mempengaruhi individu dan kelompok dan politik tidak hanya sebatas dalam ranah pemilihan umum namun juga merupakan praktek keseharian dalam masyarakat untuk mengembangkan potensi penyelesaian masalah di kemudian hari.



Gambar.1



Gambar.2

## SIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi hukum Terkait Politik dan Pemuda. di kediaman Hj. Arwinda Gusmalina, S.T. selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Provinsi Riau berjalan dengan lancar. Dengan materi-materi hukum yang disampaikan oleh Narasumber memberikan beberapa masukan dan kajian untuk memandang politik sebagai penyelesaian masalah sehingga meningkatkan kesadaran masyarakat didalam politik dan hukum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan terselenggaranya acara penyuluhan ini dengan lancar maka kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dana untuk menyelenggarakan kegiatan ini.
2. Penyelenggara Hj. Arwinda Gusmalina, S.T, selaku Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang telah menyediakan fasilitas tempat dan langsung turun membantu mengundang masyarakat untuk hadir pada acara ini.

Semua pihak baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang telah membantu teknis acara ini sehingga berjalan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Faishal Adnan. (2024). *KPU: 60 persen dari 204 juta pemilih adalah generasi muda*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/3920133/kpu-60-persen-dari-204-juta-pemilih-adalah-generasi-muda>
- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(3), 51. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/download/434/425#:~:text=Hak untuk memilih dan dipilih, Hak untuk berkumpul%2C berserikat.>
- David Oliver Purba. (2025). *Gubernur Riau Pusing, Tunda Bayar Rp 2,2 Triliun, Terbesar Sepanjang Sejarah*. Kompas.Com. <https://regional.kompas.com/read/2025/03/14/125126078/gubernur-riau-pusing-tunda-bayar-rp-22-triliun-terbesar-sepanjang-sejarah>
- Hasiholan. (2024). *Ini Penyebab Polri Peringkat Pertama Terkorup di Asia Tenggara*. INewsTangsel.Id. <https://tangsel.inews.id/read/427321/ini-penyebab-polri-peringkat-pertama-terkorup-di-asia-tenggara>
- Laila Nadliya. (2023). *Demokrasi Digital: Pengaruhnya terhadap Politik dan Pemerintahan di Indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/lailanadliya0744/655f067aee794a55172baae2/demokrasi-digital-pengaruhnya-terhadap-politik-dan-pemerintahan-di-indonesia>
- Miriam Budiardjo. (2019). *Dasar-Dasar Ilmu Politik (ke-16)*. Gramedia Pustaka Utama.
- Nafiza Suci Azzahri. (2024). *Politik Digital: Keterlibatan Media Sosial dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pada Pesta Demokrasi 2024*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. [https://www.setneg.go.id/baca/index/politik\\_digital\\_keterlibatan\\_media\\_sosial\\_dalam\\_meningkatkan\\_partisipasi\\_politik\\_generasi\\_muda\\_pada\\_ pesta\\_demokrasi\\_](https://www.setneg.go.id/baca/index/politik_digital_keterlibatan_media_sosial_dalam_meningkatkan_partisipasi_politik_generasi_muda_pada_ pesta_demokrasi_)



2024

- Salim, A., & Suyadi, A. (2020). Hak Politik Individual Pra Dan Pasca Menjadi Narapidana Dalam Sistem Ketatanegaraan. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.32493/rjih.v3i1.6617>
- Siagian, A. W. (2022). *NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DITINJAU DARI HAK MEMILIH DAN HAK DIPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM*. Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA. [https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=599#:~:text=Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik%2C sebagaimana,atas kebebasan berserikat%2C berkumpul%2C dan mengeluarkan pendapat".&text=Hak politik dalam tataran teori merupakan hak,kekayaan yang](https://rechtsvinding.bphn.go.id/?page=artikel&berita=599#:~:text=Hak yang dimaksud adalah hak berpolitik%2C sebagaimana,atas kebebasan berserikat%2C berkumpul%2C dan mengeluarkan pendapat)
- Tim DetikEdu. (2023). *Menilik Sejarah Awal Masuknya Internet di Indonesia*. DetikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6760026/menilik-sejarah-awal-masuknya-internet-di-indonesia#:~:text=Hingga pada tahun 1990%2C internet,di Indonesia terus mengalami perkembangan.>
- Vedro Imanuel Girsang. (2025). *Indeks Demokrasi Indonesia 2024 Turun Tiga Peringkat*. Tempo. <https://www.tempo.co/politik/indeks-demokrasi-indonesia-2024-turun-tiga-peringkat-1215333>
- Wanma, A. V. (2015). Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik. *Politico*, 2(6), 5–11. <https://media.neliti.com/media/publications/1123-ID-entingnya-pendidikan-politik-generasi-muda-terhadap-pelaksanaan-partisipasi-poli.pdf>

